SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Sulistio
NIM. E1031211066

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Sulistio
NIM. E1031211066

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Martinus, S.Sos, M.Si. Tanggal: 24-9-25
NIP. 197212272006041002

Dosen Pembimbing Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., M.A. Tanggal: 17/9/25
NIP. 199003122019031010

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

Oleh:
Sulistio
NIM. E1031211066

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : **Selasa, 18 Agustus 2026**
Waktu : **11.00** WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang

Tim Penguji

Ketua

Martinus, S.Sos, M.Si
NIP. 197212272006041002

Sekretaris

Haunan Fachry Rohilie S.IP, M.A
NIP. 199003182019031010

Penguji Utama

Bima Sujendra, S.IP., M.Si.
NIP. 198805072014041002

Penguji Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si
NIP. 198506092015041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Sulistio: Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. **Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2026.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dasar hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 5 prinsip *good governance* menurut Agus Dwiyanto (2014:79) yang terdiri dari partisipasi, efektif dan efisien, serta kepastian hukum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Penerapan prinsip partisipasi dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pemanfaatan media informasi, layanan daring, serta program jemput bola yang melibatkan sekolah dan instansi terkait, namun partisipasi masyarakat belum merata karena keterbatasan pemahaman sebagian orang tua sehingga keterlibatan yang terjadi masih bersifat administratif. Penerapan prinsip efektif dan efisien menunjukkan kinerja yang cukup baik melalui inovasi pelayanan, pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan, penetapan target pelayanan, serta pengelolaan sumber daya manusia, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis sarana pendukung dan ketidaklengkapan berkas pemohon yang menyebabkan keterlambatan pelayanan. Penerapan prinsip kepastian hukum telah didasarkan pada regulasi, standar pelayanan, dan SOP yang jelas serta mekanisme verifikasi data berlapis untuk menjamin keabsahan identitas anak, namun manfaatnya belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya ketidaksesuaian data administrasi dan terbatasnya pemanfaatan KIA dalam layanan publik.

Kata Kunci : Disdukcapil, KIA (Kartu Identitas Anak), *Good Governance*

ABSTRACT

This research aims to identify and evaluate the application of Good Governance principles in the distribution of Child Identity Cards (KIA) at the Department of Population and Civil Registration in Pontianak City. This study employed a qualitative, descriptive research method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The theoretical framework of this study was based on the five principles of *Good Governance* proposed by Agus Dwiyanto (2014:79), including participation, effectiveness, efficiency, and legal certainty. The findings indicate that the principle of participation in the issuance of Child Identity Cards (KIA) at the Department of Population and Civil Registration of Pontianak City has been implemented through public socialization, the use of information media, online services, and outreach services involving schools and relevant institutions. However, community participation has not been evenly distributed due to limited understanding among some parents, resulting in participation that remains largely administrative. The implementation of the effectiveness and efficiency principles demonstrates relatively good performance through service innovations, the utilization of population administration information systems, the establishment of service targets, and human resource management. Nevertheless, the implementation continues to face technical constraints related to supporting facilities and incomplete application documents, which may delay service delivery. The principle of legal certainty has been implemented through regulations, clear service standards, Standard Operating Procedures (SOPs), and a multi-level data verification mechanism to ensure the validity of children's identities. However, its benefits have not yet been fully realized due to inconsistencies in administrative data and limited use of KIA in public services.

Keywords: Department of Population and Civil Registration, Child Identity Card, *Good Governance*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh peneliti berjudul "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak". Peneliti menetapkan judul ini karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pontianak. Mulai dari cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak yang belum merata karena masih ada 36,55% anak di Pontianak yang belum memiliki KIA. Kemudian adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dalam mengelola penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pontianak.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak?". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori Agus Dwiyanto (2014:79) terkait prinsip *good governance* yang terdiri dari 3 (tiga) prinsip yaitu partisipasi, efektif dan efisien, serta kepastian hukum. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh dan jelas terkait masalah dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi pengembangan ilmu pemerintahan,

khususnya yang berkaitan layanan administrasi kependudukan terutama penerbitan Kartu Identitas Anak.

Hasil penelitian yang didasarkan pada penggunaan teori Agus Dwiyanto (2014:79) yang terdiri dari 3 prinsip *good governance* yaitu partisipasi, efektif dan efisien, serta kepastian hukum. Penerapan prinsip partisipasi dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah diupayakan melalui berbagai bentuk sosialisasi, pemanfaatan media informasi, layanan daring, serta program jemput bola yang melibatkan sekolah dan instansi terkait, namun partisipasi masyarakat belum berlangsung secara optimal dan merata karena masih terbatasnya pemahaman sebagian orang tua terhadap manfaat dan prosedur KIA sehingga keterlibatan yang terjadi cenderung bersifat administratif. Penerapan prinsip efektif dan efisien dalam pelayanan penerbitan KIA di Disdukcapil Kota Pontianak tergolong cukup baik yang ditunjukkan melalui inovasi pelayanan seperti program PECI HAJI, pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan, penetapan target pelayanan, serta pengelolaan sumber daya manusia, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis sarana pendukung dan ketidaklengkapan berkas pemohon yang berdampak pada keterlambatan proses pelayanan. Penerapan prinsip kepastian hukum dalam penerbitan KIA di Disdukcapil Kota Pontianak telah dilaksanakan berdasarkan regulasi, standar pelayanan, dan SOP yang jelas serta didukung oleh mekanisme verifikasi data berlapis guna menjamin keabsahan identitas anak, namun manfaat kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal akibat masih

ditemukannya ketidaksesuaian data administrasi dan keterbatasan pemanfaatan KIA dalam berbagai layanan publik.

Saran dari penelitian ini pada prinsip partisipasi, Disdukcapil perlu memperkuat sosialisasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami serta meningkatkan pendampingan kepada orang tua dalam proses pengurusan KIA. Koordinasi lintas sektor juga perlu dioptimalkan agar partisipasi masyarakat dapat terbangun secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan efektif dan efisien dalam program KIA dapat diwujudkan melalui meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana dan stabilitas sistem pendukung pelayanan. Selain itu, penguatan sosialisasi terkait persyaratan administrasi serta evaluasi kinerja secara berkala perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan KIA. Disdukcapil perlu meningkatkan sosialisasi prosedur dan persyaratan secara lebih rinci serta memperkuat ketelitian pada tahap awal verifikasi data. Selain itu, kerja sama lintas sektor perlu diperluas agar pemanfaatan KIA semakin optimal dan kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sulistio

Nomor Mahasiswa : E1031211066

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebelumnya guna memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Sulistio

NIM. E1031211066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

" Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman."

(Al – Imran : 139)

"Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan, karenanya, bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan."

(Aristoteles)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana dengan rahmatnya memberikan petunjuk serta kemudahan dan juga kekuatan kepada penulis dalam Menyusun skripsi hingga selesai.
2. Diri sendiri Sulistio. Terima kasih sudah bertanggung jawab dan membuktikan kepada diri sendiri bahwa mampu menyelesaikan dan melewati tanggung jawab hingga akhir. Terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam setiap prosesnya. Semoga dengan ilmu dan Pelajaran yang didapatkan memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.
3. Laki- laki terkuat di hidupku, ayahanda Salius, sesosok yang dapat memberikan Pelajaran penulis apa itu arti bersabar dalam kesulitan, dan yang selalu memberikan motivasi atas kerja kerasnya selama ini.

4. Ibuku tercinta Malaysianti , beliau adalah Ibu yang paling sabar dan yang sangat perhatian. Yang tiada henti henti nya untuk mendoakan anaknya hingga bisa sampai di titik ini.
5. Kakak ku tersayang, Imma sosok yang selalu ada untuk tempat berkeluh kesah, serta menjadi donatur penulis. Terimakasih atas kerja keras dan motivasi yang selama ini telah mengusahakan semuanya.
6. Abangku, Rizki Bahari yang selalu membuat penulis tetap semangat atas kelakuan lucunya , penulis merasa terhibur dan menjadi kuat hingga akhir.
7. Pasangan hidupku, Suci Nurmala Sari terimakasih untuk selalu mengusakan semuanya dan juga selalu sabar untuk mengahapi dan menemani penulis selama ini.
8. Anakku, Salsafa Jennaira Acio terimakasih sudah memilih untuk hadir, kehadiranmu sangat memberikan banyak Pelajaran hingga memberikan hidup penulis menjadi berwarna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak"** tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban peneliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 (Strata-1). Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Keberhasilan dari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Bima Sujendra, S.IP., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sekaligus sebagai Dosen Pembahas Utama yang sudah berkenan memberikan masukan dan saran terhadap penelitian ini.
4. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan juga sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu

memberikan semangat dalam menyelesaikan studi pada Prodi Ilmu Pemerintahan.

5. Martinus, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama proses penulisan usulan penelitian ini.
6. Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembahas Pendamping yang sudah berkenan memberikan masukan dan saran terhadap penelitian ini.
7. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Dosen Pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
9. Teman teman Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021.

Pontianak, 1 Januari 2026

Sulistio
E1031211066

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 8
1.3. Fokus Penelitian 8
1.4. Rumusan Masalah 8
1.5. Tujuan Penelitian 9
1.6. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
2.1. Definisi dan Konsep 10
2.1.1. Konsep *Good Governance* 10
2.1.2. Konsep Administrasi Kependudukan 12
2.1.3. Konsep Kartu Identitas Anak (KIA) 14
2.2. Teori *Good Governance* 17
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 18
2.4. Alur Pikir Penelitian 21

BAB III METODE PENELITIAN **26**
3.1. Jenis Penelitian 26
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 27
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 28
3.3.1. Lokasi Penelitian 28
3.3.2. Waktu Penelitian 28
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 29

3.4.1 Subjek Penelitian 29
3.4.2. Objek Penelitian 30
3.5. Teknik Pengumpulan Data 30
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 32
3.7. Teknik Analisis Data 32
3.8. Teknik Keabsahan Data 34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 36
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak 36
4.1.1.Keadaan Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administratif 36
4.1.2.Kondisi Demografi 40
4.2. Gambaran Umum Disdukcapil Kota Pontianak 42
4.2.1.Kedudukan Disdukcapil Kota Pontianak 42
4.2.2.Struktur Organisasi 43
4.2.3 Visi dan Misi Disdukcapil Kota Pontianak 44
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kota Pontianak 45
4.3. Gambaran Umum Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pontianak 51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
5.1. Hasil Penelitian 54
5.2. Pembahasan 57
BAB VI PENUTUP 91
6.1 Kesimpulan 92
6.2. Saran 93
6.3. Keterbatasan Penelitian 94
DAFTAR PUSTAKA 95
DAFTAR LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 29

Tabel 4.1 Persentase Kecamatan Terhadap Luas Kota Pontianak 38

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pontianak (2023)..... 41

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin..... 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 24
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Pontianak 37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Pontianak 44
Gambar 5.1 Tampilan PIONIRS Disdukcapil Kota Pontianak 60
Gambar 5.2 Foto Bersama Penyerahan KIA kepada Anak Sekolah 63
Gambar 5.3 Dokumentasi Program PECI HAJI Disdukcapil Kota Pontianak 72
Gambar 5.4 Standar Pelayanan Penerbitan KIA 83
Gambar 5.5 Alur SOP Pelayanan Penerbitan KIA dengan Verifikasi 88
Gambar 5.6 Tampilan Benefit Bagi Anak yang Sudah Memiliki KIA 90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran 1 Panduan Wawancara..... 96

Lampiran 2 Daftar Nama Subjek Penelitian 100

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 101

Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian..... ...102

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup..... ...103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari sistem penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara. Menurut (Purwanti dan Suharyadi, 2018:60), administrasi kependudukan berperan sentral dalam pemerintahan dan pembangunan dari berbagai proses layanan administrasi penduduk. Administrasi ini tidak hanya berfungsi untuk mencatat data penduduk, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan pemberian perlindungan hukum bagi setiap individu. Melalui sistem administrasi kependudukan yang tertata, pemerintah dapat memperoleh informasi demografis yang akurat, mutakhir, dan berkesinambungan.

Selain ini, administrasi kependudukan juga berperan dalam menciptakan keteraturan sosial dan menjamin kepastian hukum. Data yang valid memungkinkan pemerintah menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, administrasi kependudukan juga memberikan jaminan identitas hukum bagi warga negara, sehingga dapat mengurangi potensi permasalahan seperti pemalsuan identitas maupun kesenjangan dalam mengakses pelayanan publik. (Hidayat, 2018:14) juga menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat memerlukan layanan

administrasi kependudukan sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan resmi atas keberadaannya di suatu negara serta jaminan status hukum yang jelas.

Dalam lingkup pelayanan publik, administrasi kependudukan memiliki peran strategis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat. Pelayanan yang dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pembaruan sistem administrasi kependudukan perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pembaruan regulasi maupun penerapan teknologi informasi. Dengan demikian, administrasi kependudukan tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan yang sah sebagai bukti identitas diri. Sejalan dengan itu, pemerintah terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memperluas akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang diperlukan.

Salah satu bentuk nyata kebijakan dalam administrasi kependudukan adalah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, KIA ditetapkan sebagai identitas resmi

bagi anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Kartu Identitas Anak dihadirkan untuk memperkuat pendataan kependudukan, memperluas akses pelayanan publik, serta menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional anak (Ramadhani, 2020). Dengan adanya KIA, anak dapat memperoleh berbagai kemudahan layanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun layanan keuangan.

Dalam praktik pelayanan publik, khususnya pada penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, penerapan pola kerja yang tertib dan terstruktur menjadi hal yang mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, dengan tetap berpedoman pada ketentuan tertulis serta tahapan kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelayanan publik harus berpedoman pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) disertai prosedur yang jelas dan terarah sebagai pedoman pelaksanaan.

Penyelenggaraan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam kaitannya dengan *good governance* menekankan perlunya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam setiap tahap layanan. Dalam konteks administrasi kependudukan, penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar proses penerbitan KIA dapat dilaksanakan secara adil, merata, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan *good governance*, pelayanan publik diharapkan lebih cepat, sederhana, dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Keterkaitan antara penerbitan KIA dan *good governance* tampak dari bagaimana pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengelola program dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Upaya memberikan kemudahan akses informasi, mempercepat prosedur pelayanan, serta mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pembuatan KIA menjadi bentuk nyata penerapan prinsip *good governance*. Oleh sebab itu, penelitian mengenai penerbitan KIA dalam kerangka *good governance* penting dilakukan untuk menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan telah terwujud dalam pelayanan administrasi kependudukan, terutama terkait pemenuhan hak identitas anak.

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki kondisi tersendiri dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. Meskipun sudah ada dasar hukum jelas yang mengaturnya, pelaksanaan KIA di lapangan memang nyatanya tidak lepas dari berbagai kendala. Permasalahan pertama terkait dengan cakupan kepemilikan KIA yang belum merata. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) baru mencapai sekitar 63,45 persen, sehingga masih ada 36,55 persen anak yang belum memiliki identitas kependudukan tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Kepala DISDUKCAPIL Kota Pontianak saat diwawancarai oleh pegawai Radio Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

> *"Saat ini di Kota Pontianak sudah diterbitkan 118.557 Kartu Identitas Anak yang diberikan kepada anak-anak yang masuk ke dalam kriteria penerima KIA atau dari total keseluruhan anak-anak di Pontianak 63,45 persennya telah memiliki KIA. Kami mengharapkan kedepannya semakin terwujud pemerataan kepemilikan KIA."(Kepala DISDUKCAPIL Kota Pontianak, Erma Suryani, Kamis (8/5/2025).*

Persentase ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam distribusi penerbitan KIA, yang antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan pelayanan serta adanya kendala teknis dalam perekaman dan pencatatan di tingkat kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program penerbitan KIA belum sepenuhnya dapat mengakomodasi seluruh kelompok sasaran di Kota Pontianak. Keterbatasan tersebut tidak hanya berdampak pada pencapaian target administratif pemerintah daerah, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak. Anak yang belum memiliki KIA berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, maupun program perlindungan sosial yang memerlukan identitas resmi.

Permasalahan lain dalam penerbitan KIA di Kota Pontianak berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah SDM pegawai yang ada di bagian Identitas Kependudukan berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Identitas Kependudukan, 1 orang di bagian Kartu Identitas Anak, dan 2 orang di bagian Kartu Tanda Penduduk. Keterbatasan jumlah SDM dalam proses penginputan data secara online, khususnya pada bagian KIA, menyebabkan perlunya minimal dua orang petugas untuk melakukan entri data agar tidak terjadi keterlambatan, mengingat setiap hari mereka harus menangani

identitas kependudukan, termasuk KIA, yang wajib diinput secara rutin. Dari jumlah pegawai yang relatif sedikit berpengaruh pada kapasitas pelayanan, baik di kantor utama maupun pada kegiatan jemput bola di lapangan. Kondisi tersebut berimplikasi pada lamanya proses penyelesaian dokumen, terbatasnya jumlah pencetakan, serta kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dan layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.

Selain jumlah, kualitas SDM juga menjadi faktor yang memengaruhi pengelolaan penerbitan KIA. Penguasaan teknis terkait sistem informasi kependudukan, validasi data, serta digitalisasi pelayanan membutuhkan kompetensi khusus yang tidak dimiliki secara merata oleh setiap petugas. Akibatnya, layanan penerbitan KIA belum sepenuhnya efisien dan kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Fakta terkait permasalahan ini juga didukung dengan adanya dokumen Rencana Strategis Disdukcapil Kota Pontianak tahun 2020–2024, yang memang membahas terkait keterbatasan sarana prasarana pelayanan dan jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan beban kerja sehingga menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program kependudukan, termasuk dalam penerbitan KIA.

Permasalahan ketiga dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pontianak berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus dokumen tersebut. Sebagian orang tua belum sepenuhnya memahami manfaat KIA, baik dalam hal kebutuhan administrasi pendidikan, layanan kesehatan, maupun akses terhadap fasilitas publik lainnya.

Keterbatasan pengetahuan ini berdampak pada rendahnya permintaan pelayanan KIA, sehingga meskipun sarana pelayanan telah disediakan, masih banyak masyarakat yang belum merasa memiliki urgensi untuk segera mengurus identitas anak. Laporan yang dipublikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab capaian penerbitan KIA belum sesuai dengan target yang ditetapkan Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan pemerintah daerah, seperti program jemput bola di sekolah, pelayanan melalui mobil keliling, hingga kerja sama lintas sektor. Namun, langkah-langkah tersebut masih menghadapi kendala dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Kurangnya pemahaman yang merata, ditambah dengan faktor sosial-ekonomi seperti keterbatasan waktu dan biaya transportasi, membuat sebagian keluarga menunda pengurusan KIA.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Pontianak masih menghadapi tantangan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip *good governance/*tata kelola pemerintahan yang baik dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan penelitian yang berjudul **"Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak yang belum merata karena masih ada 36,55% anak di Pontianak yang belum memiliki KIA.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dalam mengelola penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pontianak.

1.3. Fokus Penelitian

Dari berbagai fenomena permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini pada Penerapan Prinsip *Good Governance* yang dilihat dari Prinsip Partisipasi, Efektif & Efisien, dan Kepastian Hukum, yang berfokus pada Peningkatan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta hasil identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak?".

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat berupa kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan dalam program studi Ilmu Pemerintahan serta menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam mengkaji fenomena serupa, khususnya terkait pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pelaksana maupun seluruh pihak terkait di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, terutama dalam penerapan prinsip *good governance* pada proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA.